



Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya

Ade Andriyan^{a,1*}, Wiwin Hendriani^{b,2}, Pramesti Pradna Paramita^{c,3}

^{a,b,c}Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya

¹ade.andriyan-2020@psikologi.unair.ac.id; ²wiwin.hendriani@psikologi.unair.ac.id;

³pramesti.paramita@psikologi.unair.ac.id

*Correspondent Author

Received: 19-10-2022

Revised: 04-06-2023

Accepted: 22-10-2023

KATAKUNCI

anak berkebutuhan khusus;
pendidikan anak
berkebutuhan khusus;
pendidikan inklusi;
strategi;
tantangan

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan inklusi dirumuskan berdasarkan prinsip kesetaraan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan sebagaimana anak normal lainnya di sekolah reguler. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah serta menjabarkan strategi yang dapat diaplikasikan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Metode penelitian ini menggunakan *scoping literature review*. Data diperoleh dengan meninjau beberapa situs database yakni *Google Scholar*, *Research Gate*, *Science Direct*, dan *ERIC*. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi minimnya sarana penunjang pendidikan inklusi, terbatasnya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru di sekolah inklusi, sistem kurikulum yang belum mengakomodasi kebutuhan ABK, stigma negatif dari masyarakat, manajemen dan sumber daya sekolah yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Sementara itu, strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan implementasi pendidikan inklusi di sekolah antara lain dengan meningkatkan kualitas *in-service training* (INSET) kepada guru, menyediakan kurikulum inklusi, menyelenggarakan program *awareness*, *school-based professional development programmes*, *family support*, kontekstualisasi proses pembelajaran, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan layanan dan fasilitas umum yang ramah bagi ABK, hingga kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders* baik secara regional, nasional, maupun internasional. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya psikologi pendidikan dengan menjabarkan apa saja kendala yang masih menjadi permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah. Selain itu, berbagai strategi yang telah diuraikan dapat memperkuat konsep dan temuan dari penelitian sebelumnya, serta digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam membuat langkah intervensi yang tepat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Inclusive education: Challenges and implementation strategies

Inclusive education policies are formulated based on the principle of equality so that children with special needs can access education like other normal children in regular schools. This study aims to review the

KEYWORDS

challenges;
children with special needs;

education for children with
inclusive education;
special needs strategies

obstacles or challenges faced in the implementation of inclusive education in schools and describe strategies that can be applied to optimize the implementation of inclusive education. The method used in this research is scoping literature review. Data was obtained by reviewing several database sites, namely Google Scholar, Research Gate, Science Direct, and ERIC. The results and conclusions of the study show that the challenges or obstacles faced in the implementation of inclusive education include the lack of supporting facilities for the inclusive education system, the limited understanding and competence possessed by teachers in inclusive schools, the curriculum system that has not accommodated the needs of children with special needs, negative stigma from the community, management and inadequate school resources, to the accessibility of school facilities that have not applied the inclusive principle. Meanwhile, strategies that can be applied to overcome barriers to implementing inclusive education in schools include improving the quality of in-service training (INSET) for teachers, providing an inclusive curriculum, organizing awareness programs, school-based professional development programs, family support, contextualizing the process. learning, government involvement in the provision of friendly public services and facilities for children with special needs, to cooperation and collaboration with stakeholders both regionally, nationally and internationally. Furthermore, it is expected that the results of this literature review can contribute to the world of education, especially educational psychology, by explaining what obstacles are still problems in implementing inclusive education at the school level. Apart from that, the various strategies that have been described can strengthen the concepts and findings from previous research and be used as references or material for consideration in making appropriate intervention steps according to the characteristics of the problems faced.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih menjadi isu yang banyak digaungkan hingga menarik atensi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan mencari solusi agar setiap anak mendapatkan hak dan pelayanan pendidikan terbaik. Salah satu upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan dan pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang diberikan melalui sekolah reguler (Aas, 2019; Göransson *et al.*, 2019; Kenny *et al.*, 2020; Savolainen *et al.*, 2020). Berdasarkan *Index of Inclusion*, pendidikan inklusi tidak hanya terbatas pada konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus, melainkan mengacu pada prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*). Akses pendidikan tersebut bersifat ramah bagi semua dengan pendekatan yang berupaya menjangkau semua orang tanpa terkecuali, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau lainnya, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), anak berbakat, anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari etnis dan bahasa minoritas, serta kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal harus diperlakukan sama (Booth & Ainscow, 2002; Florian, 2019; Rusmono, 2020).

Konsep pendidikan inklusi bertujuan untuk melibatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler di mana guru harus menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja

secara kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian (Lambrecht *et al.*, 2020; Wardah, 2019). Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Forlin & Lian, 2008; Muazza *et al.*, 2018). Melalui pendidikan inklusif diharapkan dapat menghilangkan pendidikan yang diskriminatif dan mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam lingkup pendidikan. Di samping itu, pendidikan inklusif juga merupakan sarana untuk memberikan kesempatan yang besar bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya (Nurhadisah, 2019; Wardah, 2019).

Disebutkan bahwa terdapat tiga dimensi yang mencerminkan lembaga pendidikan inklusif antara lain meliputi dimensi budaya, dimensi kebijakan, dan dimensi praktik (Booth & Ainscow, 2002). Dimensi budaya dalam penyelenggaraan sekolah inklusi mengacu kepada sub dimensi yaitu membangun komunitas dan terbangunnya nilai-nilai inklusi. Budaya bukan hanya berasal dari pikiran, namun lebih kepada tindakan (Nes, 2009). Mewujudkan budaya inklusi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, namun butuh kerjasama dari banyak pihak atau komunitas terkait. Kerjasama ini yang nantinya dapat mewujudkan penerapan nilai-nilai inklusi. Pada ranah sekolah dan pendidikan, guru tidak dapat berkerja sendiri dalam menyelenggarakan program inklusi, mereka membutuhkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait (Sulistyaningsih & Handayani, 2018).

Selanjutnya dimensi kebijakan meliputi strategi untuk merubah budaya ke arah inklusi serta dukungan untuk semua aktivitas yang dapat meningkatkan kapasitas sekolah dalam merespon perbedaan dari peserta didik (Booth & Ainscow, 2002). Selain budaya dan kebijakan, praktik menjadi hal yang cukup penting di mana dimensi ini merupakan implementasi dari dua dimensi sebelumnya, sehingga ketiga dimensi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nilai dalam dimensi budaya seperti menghargai perbedaan harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan dalam bentuk strategi meminimalisir tindakan *bullying*, dan dalam praktiknya diimplementasikan dengan membangun hubungan yang harmonis baik di kelas maupun luar sekolah (Nes, 2009; Sulistyaningsih & Handayani, 2018). Dengan demikian, lembaga pendidikan atau sekolah yang inklusif merupakan sebuah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak dan tempat di mana setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat yang lain tanpa memandang kemampuan, gender, latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama, maupun bahasanya.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusi telah berjalan lebih dari 10 tahun dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan khususnya para praktisi pendidikan. Landasan yuridis terkait implementasi pendidikan inklusi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah/satuan pendidikan menengah pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kemendikbudristek, 2022). Akan tetapi, pada kenyataannya selama ini tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di setiap daerah berbeda-beda dan masih memiliki banyak permasalahan. Tidak banyak sekolah yang mampu menerapkan pendidikan inklusi dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pendidikan Luar Biasa tahun 2018 hanya 18 persen atau sekitar 299.000 dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang telah mendapatkan layanan pendidikan inklusi (Zakiah *et al.*, 2021). Hal tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah agar segera menemukan solusi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi.

Pada dasarnya berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dipengaruhi oleh seberapa baik pemahaman inklusi pelaksana/pengelola dalam hal ini baik kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, dan tenaga kependidikan lainnya dan ketersediaan sumber daya yang memadai baik yang terkait dengan dukungan masyarakat, keuangan dan infrastruktur di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (Besic *et al.*, 2020). Hal ini didukung oleh mayoritas temuan penelitian di seluruh dunia yang menyatakan bahwa masih banyak guru yang belum memahami dan beradaptasi dengan siswa berkebutuhan khusus (Elder & Kuja, 2019; Schwab *et al.*, 2019). Meskipun implementasi kebijakan pendidikan inklusif berdampak positif baik bagi siswa maupun lingkungan, di sisi lain masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kemampuan dari guru berlatar belakang pendidikan non-kekhususan, masalah kurikulum, dan kurangnya sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus (Zakiah *et al.*, 2021). Oleh karena itu, masih diperlukan upaya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan studi empiris sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tinjauan lebih lanjut terkait dengan tantangan dan strategi dalam mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi menarik untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang coba dijawab melalui penyusunan artikel ini, yakni 1) apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusi? dan 2) bagaimana solusi atau strategi untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi? Hal ini penting untuk dikaji guna memberikan informasi tentang hambatan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur penelitian terkait tema serupa, selain memperkuat konsep dan hasil temuan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi praktis yang dapat mendorong dilakukannya penelitian lanjutan yang bersifat progresif serta dipertimbangkan sebagai rekomendasi atau referensi dalam menyusun kebijakan dalam rangka mengupayakan pelaksanaan pendidikan inklusi yang efektif.

Metode

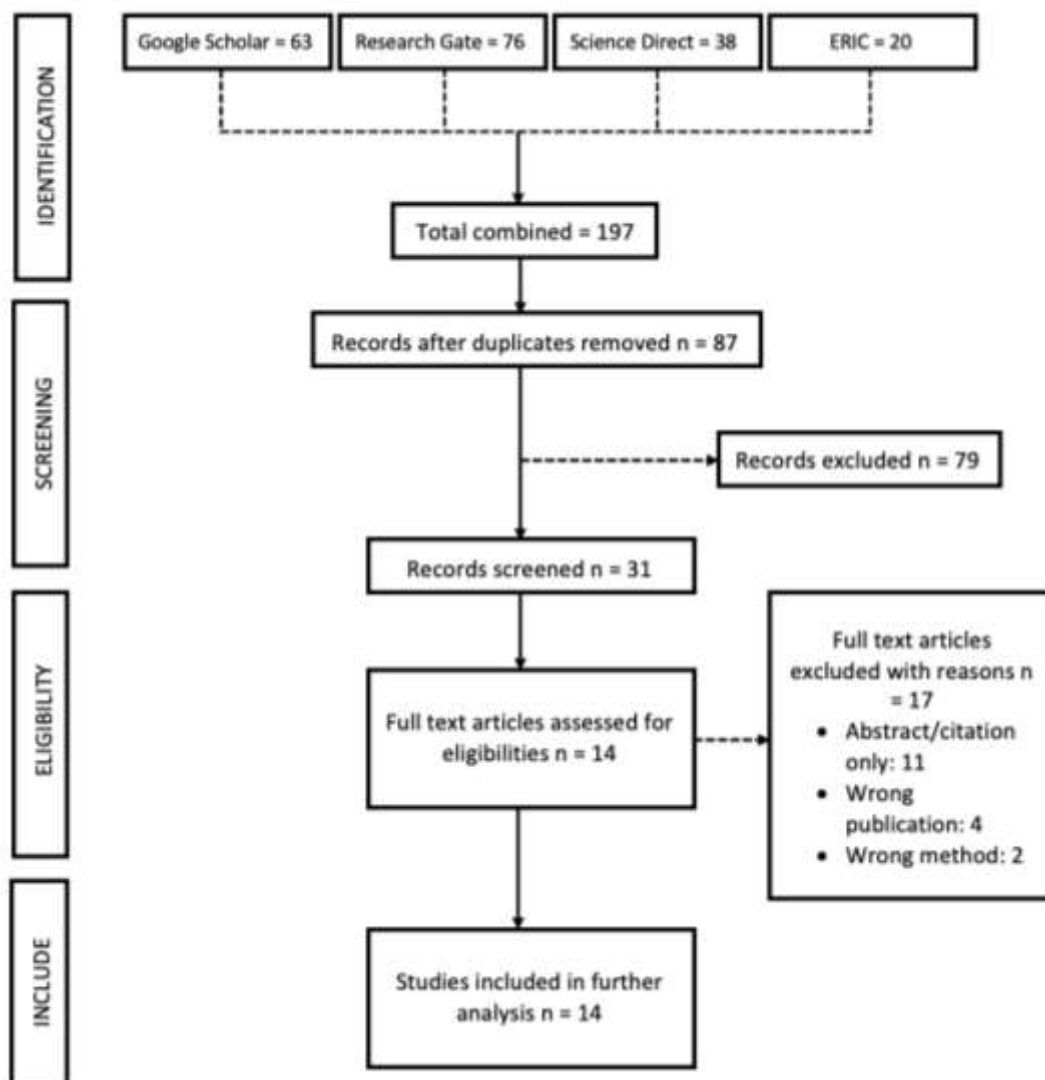
Artikel ini disusun berdasarkan telaah sistematis yang dilakukan pada sejumlah penelitian yang terbatas dalam rentang publikasi 10 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah *scoping literature review*, yaitu salah satu desain dari metode *literature review* yang bertujuan untuk menjawab dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. Pelaksanaan penelitian *scoping literature review* mengacu pada tahapan kerangka kerja penyusunan *scoping review* oleh Levac *et al.* (2010) diantaranya yakni 1) mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian; 2) mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui berbagai sumber; 3) seleksi literatur yang telah diperoleh sesuai dengan topik penelitian; 4) melakukan pemetaan dan mengumpulkan literatur yang digunakan; 5) menyusun dan melaporkan hasil analisis literatur yang telah dipilih; dan 6) konsultasi dengan pihak yang kompeten.

Pencarian literatur artikel ilmiah dan jurnal dilakukan dengan meninjau beberapa situs database yakni *Google Scholar*, *Research Gate*, *Science Direct*, dan *ERIC*. Kata kunci yang digunakan antara lain yakni pendidikan inklusi, tantangan pendidikan inklusi, strategi pendidikan inklusi, dan optimalisasi pendidikan inklusi. Setiap artikel dan jurnal ilmiah yang ditemukan diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, antara lain 1) artikel jurnal atau penelitian ilmiah terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi sekolah dalam implementasi pendidikan inklusi; 2) artikel jurnal atau penelitian ilmiah terkait strategi dalam mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi; 3) artikel jurnal atau penelitian ilmiah berbahasa Inggris; 4) penelitian empiris (kualitatif dan

kuantitatif); 5) artikel jurnal atau penelitian ilmiah yang dapat diakses oleh umum (*open access article*); 6) artikel jurnal atau penelitian ilmiah yang dapat diunduh.

Hasil

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat 197 literatur yang teridentifikasi berkaitan dengan topik penelitian yang telah ditetapkan. Seleksi awal menunjukkan terdapat 87 literatur duplikasi dan 79 lainnya tidak memenuhi kriteria inklusi. Sebanyak 31 literatur lolos proses seleksi *eligibility*, namun hanya 14 literatur yang memenuhi kriteria inklusi. Gambar 1 berikut ini merupakan detail jumlah literatur yang diidentifikasi dari hasil pencarian, proses penyaringan, jumlah penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, dan jumlah penelitian yang akan diikutsertakan untuk tinjauan menyeluruh.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA-P (Moher et al., 2015)

Setelah melalui proses seleksi dengan menggunakan teknik analisis PRISMA-P 2015 (Moher *et al.*, 2015), diperoleh sebanyak 14 literatur yang memenuhi kriteria inklusi. Literatur yang termasuk inklusi kemudian dibaca dengan seksama guna mengumpulkan data-data

penting seperti tahun publikasi, nama penulis, judul, tujuan/pertanyaan/hipotesis penelitian, konteks, variabel yang terlibat, subjek, tipe dan desain penelitian, jumlah sampel, hasil perhitungan statistik, kesimpulan, dan evaluasi. Setiap literatur yang diperoleh sangat bervariasi baik dari segi subjek, konteks, metode, maupun hasil penelitian. Berikut tabel 1 yang merupakan daftar literatur yang telah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1.
Daftar Analisis Literatur

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Sumber
1.	Sari & Hendriani	2021	Hambatan Pendidikan Inklusi dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara	Studi kepustakaan	Research Gate
2.	Muhibbin & Hendriani	2021	Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: <i>Literature Review</i>	Studi kepustakaan	Research Gate
3.	Zakiah, dkk.	2021	<i>The Implementation of Inclusive Educational Policies in Elementary School</i>	Mixed-method	Research Gate
4.	Ikramullah, dkk.	2020	Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar	Kualitatif	GoogleScholar
5.	Rusmono	2020	Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: <i>Literature Review</i>	Studi kepustakaan	GoogleScholar
6.	Sukadari	2019	Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus	-	GoogleScholar
7.	Agung, dkk.	2017	Pengembangan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran (LIRP) bagi Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng	Penelitian tindakan (<i>action research</i>)	GoogleScholar
8.	Khoeriah	2017	<i>Individualized educational program</i> dalam Implementasi Pendidikan Inklusif	Studi Kepustakaan	GoogleScholar
9.	Sanagi	2016	<i>Teachers' Misunderstanding the Concept of Inclusive Education. Contemporary Issues Education Research</i>	Kuantitatif	ERIC
10.	Hamdan et al.	2016	<i>Implementation of Co-teaching Approach in an Inclusive Classroom: Overview of the Challenges, Readiness, and Role of Special Education Teacher</i>	Kuantitatif	ERIC
11.	Tarnoto	2016	Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD	Indigenous reseach	Research Gate
12.	Genova	2015	<i>Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: results from emancipatory disability research</i>	Kualitatif	Research Gate
13.	Abongdia et al.	2015	<i>Challenges encountered by teachers in identifying learners with learning barriers: Toward inclusive education</i>	Kualitatif	Research Gate
14.	Bhatnagar & Das	2014	<i>Regular school teachers' concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India</i>	Kualitatif	ERIC

Pembahasan

Hasil pencarian literatur melalui artikel jurnal atau penelitian ilmiah memberikan pemahaman dan gambaran yang bervariasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi di berbagai *setting* pendidikan di berbagai wilayah. Menariknya, setiap wilayah mengalami tantangan dan hambatan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh budaya, pemangku kebijakan, lingkungan sekitar, hingga karakter atau ciri khas individu dari setiap wilayah. Strategi yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut pun bervariasi, dan hal tersebut disesuaikan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan dari masing-masing sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan inklusi (Sari & Hendriani, 2021).

Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Pada tataran pelaksanaannya, pendidikan inklusi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan problematik yang menghambat proses penyelenggaraannya. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya meliputi minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi. Hal ini menunjukkan rumusan atau rancangan program pendidikan inklusi belum dipersiapkan secara matang sehingga program pendidikan inklusi terkesan seperti sebuah program eksperimental. Sementara di sisi lain, tantangan yang berdampak secara khusus pada anak berkebutuhan khusus meliputi 1) tantangan sosial emosional; 2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam *setting* inklusif. Sistem kurikulum pendidikan umum yang berlaku saat ini masih belum mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Sukadari, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2016) terhadap 18 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang tersebar di Kota Yogyakarta, permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi secara umum adalah terkait dengan guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi, serta kurangnya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Temuan yang hampir serupa juga dijabarkan oleh penelitian yang dilakukan Zakiah dkk (2021) di mana kendala atau tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surakarta antara lain kurangnya pemahaman dan kemampuan dari guru non-kekhususan, masalah kurikulum, dan kurangnya sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, cara pandang masyarakat yang keliru terhadap anak berkebutuhan khusus, manajemen dan sumber daya sekolah yang tidak memadai serta aksesibilitas fasilitas sekolah yang belum menerapkan prinsip inklusif juga menjadi tantangan pendidikan inklusi (Muhibbin & Hendriani, 2021).

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian di atas, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah yakni adanya sikap yang kurang berkenan seperti pemberian stigma negatif bahkan menganggap individu penyandang disabilitas dengan *'something negative, bad, incomplete, problematic, 'stamp' in life'* (Genova, 2015; Sari & Hendriani, 2021). Hal ini tentu semakin memperburuk kondisi ketidakmampuan individu berkebutuhan khusus karena mereka harus menanggung dua beban sekaligus, yaitu beban disabilitas dan beban stigma yang ditujukan pada mereka (Sari & Hendriani, 2021). Selain adanya sikap negatif tersebut, adanya keterbatasan aksesibilitas fasilitas umum seperti toilet, transportasi umum, tidak adanya bidang landai/bidang miring maupun lift karena struktur bangunan yang bertingkat juga menjadi permasalahan bagi individu yang memiliki disabilitas fisik maupun mereka yang menggunakan kursi roda (Bhatnagar & Das, 2014; Genova, 2015; Sari & Hendriani, 2021). Tidak tersedianya fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanyalah sekadar kebijakan saja karena tidak ada praktik yang cukup berarti untuk membuat individu dengan disabilitas dapat

berfungsi dan produktif seperti orang normal lainnya (Genova, 2015).

Permasalahan lainnya yang kerap menjadi kendala dalam pendidikan inklusi yakni kurangnya manajemen serta minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi. Hal ini jelas menambah beban tugas dan tanggung jawab yang harus diemban pihak sekolah khususnya para guru sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Guru tidak dibekali pemahaman dan kompetensi yang diperlukan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya pelatihan atau kurang efektifnya pelatihan kepada guru di sekolah inklusi. Pelatihan yang diberikan hanya berupa formalitas sebagai bukti tanpa melihat efektifitas dan perbaikan yang dihasilkan setelah pelatihan diberikan (Abongdia *et al.*, 2015). Alih-alih menciptakan sistem dan lingkungan belajar yang inklusi, hal tersebut justru dapat menciptakan eksklusivitas bagi siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan kelas yang regular. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus di dalam kelasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekolah sebagai lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh sarana, prasarana, serta sumber daya yang memadai, khususnya tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Sesuai dengan Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, disebutkan terdapat delapan komponen yang harus mendapat perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah inklusif yang meliputi 1) peserta didik; 2) kurikulum; 3) tenaga pendidik; 4) kegiatan pembelajaran; 5) penilaian dan sertifikasi; 6) manajemen sekolah; 7) penghargaan dan sanksi; dan 8) pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik sebagaimana yang tercantum dalam poin ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Selain guru kelas dan guru mata pelajaran, tenaga pendidik dalam pendidikan inklusi juga mencakup guru pembimbing khusus.

Guru pembimbing khusus merupakan guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang bertugas untuk memberikan pendampingan baik berupa bimbingan, advokasi, atau konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kustawan, 2016). Di samping bertugas di sekolah luar biasa (SLB) yang menjadi induk instansinya, guru pembimbing khusus juga harus siap jika diperlukan untuk datang ke sekolah inklusi yang menjadi tanggung jawabnya. Kehadiran mereka akan sangat dibutuhkan oleh warga sekolah inklusif khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Pun demikian, kerap terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dan tanggung jawab guru pembimbing khusus di sekolahnya. Tidak sedikit guru kelas yang beranggapan bahwa tanggung jawab anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya diserahkan sepenuhnya kepada guru pembimbing khusus. Sementara tanggung jawab tersebut pada dasarnya tetap dipegang oleh guru kelas. Artinya, tugas guru pembimbing khusus adalah berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus mulai dari mengidentifikasi, melakukan asesmen, sampai menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut.

Strategi Implementasi Pendidikan Inklusi

Index for Inclusion merupakan suatu sumber informasi untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusi yang berprinsip guna mengembangkan sekolah dan meletakkan nilai-nilai inklusi dalam pelaksanaannya (Booth & Ainscow, 2002). Pengertian inklusi dalam indeks ini bukan hanya terbatas pada ABK, namun mengacu pada prinsip pendidikan untuk semua. Indeks ini dibuat untuk membantu sekolah mengembangkan pendidikan inklusi berdasarkan nilai-nilai yang akan dikembangkan di sekolah. Begitupula bahwa indeks tersebut hanyalah

acuan atau pedoman, di mana sekolah tetap diberikan kebebasan dalam mengembangkan sampai sejauh mana proses pelaksanaan pendidikan inklusi dengan mengacu pada indikator-indikator yang terdapat dalam indeks.

Beragam hasil penelitian telah mendukung ideologi inklusi agar dapat diterapkan secara meluas. Berbagai usaha juga telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan realitas yang terjadi di lapangan. Adapun prinsip-prinsip panduan strategi yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusi meliputi kesetaraan, relevansi, akses, efektivitas, serta efisiensi. Kesetaraan maksudnya adanya partisipasi yang setara dalam pendidikan dengan mengatasi perbedaan yang disebabkan oleh dampak hambatan sosial yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh disabilitas dan/atau kesulitan dalam pembangunan. Prinsip relevansi artinya pendidikan yang diselaraskan dengan karakteristik individu, kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Akses yakni melaksanakan kegiatan yang memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan pendidikan khusus berpartisipasi secara setara dengan teman sebayanya, melalui layanan yang memadai dan tepat sasaran di masyarakat setempat. Efektivitas berarti strategi yang digunakan efektif dalam meningkatkan prestasi dan partisipasi anak, meningkatkan penghapusan prasangka dan kepercayaan stereotip dalam proses pengajaran, hubungan siswa-guru dan kondisi kerja di sekolah. Sementara efisiensi maksudnya pengembangan individu dan komunitas yang menghargai keragaman.

Berdasarkan telaah dari berbagai literatur, strategi yang sedang dan/atau telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi yakni dengan meningkatkan kualitas *in-service training* (INSET) kepada guru pendidikan inklusi, *awareness programmes*, *school-based professional development programmes*, *family support*, kontekstualisasi proses belajar-mengajar, rencana implementasi kebijakan yang memberikan dukungan berkelanjutan selama proses implementasi di lapangan, komitmen dari pemerintah untuk memberikan sebagian anggaran sebagai sumber dana pendidikan inklusi dalam rancangan anggaran, pertemuan dengan *stakeholders* untuk memberikan informasi tentang keuntungan dari adanya pendidikan inklusi, kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders*, kerjasama serta kolaborasi secara regional, nasional, maupun internasional (Sari & Hendriani, 2021).

Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan serta pembelajaran inklusi yang baik diperlukan partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Guru adalah faktor penggerak utama dalam proses pendidikan inklusi. Oleh karena itu, tanpa kerja sama dan bantuan dari perangkat sekolah lainnya, maka pelaksanaan pendidikan inklusi tidak dapat berjalan optimal (Tarnoto, 2016; Rusmono, 2020). Penting bagi guru untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengelola kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Pemahaman guru terkait pendidikan inklusi menjadi pondasi yang mendasari bagaimana seorang guru sadar akan perbedaan dan keragaman diantara siswanya. Untuk mendapatkan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengajar siswa yang memiliki beragam latar belakang tersebut guru perlu mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan hal tersebut (Sanagi, 2016).

Guna menyikapi kebutuhan tersebut, pihak sekolah dapat memfasilitasi dengan mendatangkan pihak profesional dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus. Alhasil, guru diharapkan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus, serta menanamkan komitmen untuk bekerja sama dengan guru lain sehingga dapat berdiskusi mengenai penggunaan *individualized educational program* bagi siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler (Bublitz, 2016). *Individualized education program* atau program pendidikan individual merupakan metode yang bersifat personal dan digunakan untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan (Khoeriah, 2017).

Salah satu pelatihan yang dapat diikuti oleh guru yakni *co-teaching*. *Co-teaching*

merupakan metode pengajaran yang dilakukan oleh dua orang guru dalam satu kelas. Metode tersebut memungkinkan guru untuk meningkatkan keterikatan terhadap kelas yang diajarnya dan juga dapat mengurangi tingkat pertukaran. Melalui *co-teaching*, guru dapat berbagi informasi mengenai pembelajaran dengan dengan siswa di kelas, mengurangi beban guru di kelas karena pembelajaran dilakukan oleh dua guru, dan memberikan pengalaman lebih dalam mengajar. Jika guru yang mengajar dapat bekerjasama dengan baik, maka beban mengajar yang dirasakan akan berkurang (Hamdan *et al.*, 2016). Selain pelatihan mengenai *co-teaching*, guru juga dapat mengikuti pelatihan LIRP (lingkungan inklusi ramah pembelajaran). Pelatihan ini menuntut guru untuk menggambarkan bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah pembelajaran dengan cara melakukan refleksi pada beberapa modul yang telah disediakan. Setelah mendapatkan pelatihan tersebut guru dapat menumbuhkan pengetahuan bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang yang beragam, membangun pengetahuan bagaimana siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler belajar, dan juga dapat melihat celah untuk dapat mengembangkan sikap positif (Agung *et al.*, 2017).

Bukan hanya guru yang perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus, namun dari segi sosialnya orang tua dan masyarakat sekitar juga perlu sadar bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan bantuan dan dukungan yang lebih dari anak sebaya pada umumnya. Orang tua juga perlu melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan sosial untuk mengasah keterampilan sosialnya. Namun hal yang perlu disadari bahwa anak tidak dapat diikutsertakan pada semua kegiatan sosial, melainkan anak dapat diikutsertakan pada kegiatan di masyarakat yang tidak terlalu menuntut secara sosial. Partisipasi anak dalam kegiatan masyarakat juga akan memengaruhi bagaimana dirinya berpartisipasi di kelas dalam pembelajaran. Dengan berpartisipasi di kelas, juga akan meningkatkan kesadaran teman sekelasnya bahwa terdapat siswa yang spesial dan memerlukan penanganan khusus dalam pembelajaran (Rusmono, 2020).

Sementara itu, beberapa strategi lain yang dapat dilakukan yakni dengan menyelenggarakan program *awareness*, bekerjasama dengan tim atau kelompok kerja yang memiliki *resource center* yang mendukung implementasi pendidikan inklusi, hingga keterlibatan pemerintah seperti penyediaan dana untuk menyelenggarakan pelatihan guru kelas, dan membangun fasilitas umum yang lebih ramah terhadap individu dengan disabilitas seperti bidang landai/ bidang miring, *lift*, *guiding block*, dan transportasi umum yang ramah terhadap individu dengan tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut, sekolah dapat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan menciptakan sebuah lingkungan dimana individu dengan berkebutuhan khusus tidak harus lagi menyembunyikan disabilitasnya, tetapi ikut merayakan keberagaman bersama dengan individu normal lainnya (Sari & Hendriani, 2021). Solusi penerapan pendidikan inklusi pada tingkat manajemen sekolah sesungguhnya berpulang kepada aktivasi kepala sekolah dan guru pendamping kelas dengan melibatkan perhatian orang tua murid, yang dengan sinergi ini, maka pengelolaan dapat lebih optimal dan berdaya guna, efektif serta efisien (Ikramullah, & Sirojuddin, 2020).

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan di dalamnya, diantaranya yakni terbatas dalam hal penggunaan sumber *database* yang digunakan sehingga ruang lingkup pencariannya terbatas. Selain itu, topik penelitian masih bersifat umum dengan berbagai temuan yang dihasilkan sangat beragam dalam berbagai konteks maupun jenjang pendidikan, sehingga beberapa temuan mungkin tidak relevan apabila dihadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu yang lebih spesifik. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek guna menghasilkan temuan-temuan yang menguatkan maupun melengkapi hasil penelitian sebelumnya.

Simpulan

Program kebijakan pendidikan inklusi pada saat ini telah berjalan lebih dari satu dekade, namun penerapannya masih jauh dari status memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah sekolah yang mampu mengakomodasi kebijakan tersebut hingga tataran pelaksanaannya yang sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang begitu kompleks. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi secara garis besar diantaranya, masih minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru di sekolah inklusi, sistem kurikulum pendidikan reguler yang berlaku masih belum mengakomodasi kebutuhan ABK, stigma negatif masyarakat terhadap ABK, manajemen dan sumber daya sekolah yang tidak memadai, hingga aksesibilitas fasilitas sekolah yang belum menerapkan prinsip inklusif. Terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, program pendidikan inklusi masih perlu penguatan pada beberapa aspek tidak terkecuali peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Selain itu, beberapa aspek lainnya yang dapat ditingkatkan untuk mengoptimalkan pendidikan inklusi baik di lingkungan rumah maupun sekolah antara lain yakni dengan mendorong keterlibatan pemerintah dalam penyediaan layanan dan fasilitas umum yang ramah bagi ABK, hingga menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders* baik secara regional, nasional, maupun internasional guna lebih memahami bagaimana pemenuhan kebutuhan ABK dalam lingkup pendidikan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya psikologi pendidikan dengan menjabarkan apa saja kendala-kendala yang masih menjadi permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah. Selain itu, berbagai strategi yang telah diuraikan dapat memperkuat konsep dan hasil temuan dari penelitian sebelumnya, serta digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam membuat langkah intervensi yang tepat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Aas, H. K. (2019). Teachers talk on student needs: Exploring how teachers beliefs challenge inclusive education in Norwegian context. *International Journal of Inclusive Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1698065>
- Abongdia, J. A., Foncha, J. W., & Dakada, A. (2015). Challenges encountered by teachers in identifying learners with learning barriers: Toward inclusive education. *International Journal of Educational Sciences*, 8(3), 493–501. <https://doi.org/10.1080/09751122.2015.11890271>
- Agung, A. A. A., Pudjawan, K., Oka, G. P. A., (2017). Pengembangan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran (LIRP) bagi sekolah dasar di Kecamatan Buleleng. *Jurnal IMEDTECH* 1(1), 68–71. <https://doi.org/10.5821/zenodo.2547101>
- Besic, E., Paleczek, L., & Gasteiger-Klicpera, B. (2020). Don't forget about us: Attitudes towards the inclusion of refugee children with(out) disabilities. *International Journal of Inclusive Education*, 24(2), 202–217. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1455113>
- Bhatnagar, N., & Das, A. (2014). Regular school teachers' concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India. *International Journal of Instruction*, 7(2), 89–102. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085257.pdf>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: Developing learning a participation in schools. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Bublitz, G. (2016). Effective strategies for district leadership to create successful inclusion models: special education directors and school reform in context of least restrictive environment (Doctoral Dissertation). Loyola University Chicago. Diakses dari Proquest Dissertation & Theses Database <https://search.proquest.com/docview/1804049365?accountid=31533>

- Elder, B. C., & Kuja, B. (2019). Going to school for the first time: Inclusion committee members increasing the number of students with disabilities in primary schools in Kenya. *International Journal of Inclusive Education*, 23(3), 261–279. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1432082>
- Florian, L. (2019). On the necessary co-existence of special and inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 23, 7-8, 691-704. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622801>
- Forlin, C., & Lian, M.-G.J. (Eds.). (2008). Reform, inclusion and teacher education: Towards a new era of special education in the asia-pacific region (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203895313>
- Genova, A. (2015). Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: Results from emancipatory disability research. *Disability & Society*, 30(7), 1042–1054. <https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867>
- Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, N., Magnússon, G., & Almqvist, L. (2019). Professionalism, governance and inclusive education – A total population of Swedish special needs educators. *International Journal of Inclusive Education*, 23(6), 559–574. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1441339>
- Hamdan, A. R., Anuar, M. K., Khan, A. (2016). Implementation of co-teaching approach in an inclusive classroom: Overview of the challenges, readiness, and role of special education teacher. *Asia pacific education review* 17(2), 289–298. <https://doi.org/10.1007/s12564-016-9419-8>
- Ikramullah, & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi manajemen sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131-139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2022). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Kenny, N., McCoy, S., & Mihut, G. (2020). Special education reforms in Ireland: Changing systems, changing school. *International Journal of Inclusive Education*. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1821447>
- Khoeriah, N. D., (2017). Individualized educational program dalam implementasi pendidikan inklusif. *INCLUSIVE: Journal of Special Education*. 3(1), 41–49. <https://doi.org/10.30999/jse.v3i1.151>
- Kustawan, D. (2016). Pendidikan inklusif dan upaya implementasinya. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2020). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825>
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation science* 5, 69, 1-9. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Madanih, R. (2023). A model for inclusive education in Indonesia: The Lazuardi Global Islamic School. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(1), 14–24. <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33367>
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., & PRISMA-P Group (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ (Clinical research ed.)*, 350, g7647. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7647>
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analyses of inclusive education policy: A case study of elementary school in Jambi. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Muhibbin, M., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: Literature review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4(2). 92–102. <http://dx.doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>
- Nes, K. (2009). The role of the Index for Inclusion in supporting school development in Norway: A comparative perspective. *Research in Comparative and International Education*, 4(3), 305-320. <https://doi.org/10.2304/rcie.2009.4.3.305>
- Nurhadisah. (2019). Implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 2(2), 201–211. <https://doi.org/10.22373/jie.v2i2.4177>
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209–217. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/2859>

- Sanagi, T. (2016). Teachers' misunderstanding the concept of inclusive education. *Contemporary Issues Education Research*, 9(3), 103-114. <https://doi.org/10.19030/cier.v9i3.9705>
- Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97-116. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>
- Savolainen, H., Malinen, O.-P., & Schwab, S. (2020). Teachers efficacy predicts teachers' attitudes towards inclusion-a longitudinal cross-lagged analysis. *International Journal of Inclusive Education*, 27, 1-15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752826>
- Schwab, S., Sharma, U., & Hoffmann, L. (2019). How inclusive are the teaching practices of my German, Maths and English teachers? Psychometric properties of a newly developed scale to assess personalisation and differentiation in teaching practices. *International of Inclusive Education*, 26, 1-6. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1629121>
- Sukadari. (2019). Model pendidikan inklusi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Sulistiyarningsih, R., & Handayani, M. M. (2018). Analisis penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan index for inclusion. *Happiness: Journal of Psychology and Islamic Science*, 2(2), 67-81. <https://doi.org/10.30762/happiness.v2i2.341>
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *HUMANITAS* 13(1), 50-61. <http://dx.doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan guru pembimbing khusus lulusan non-pendidikan luar biasa (PLB) terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 2(2), 93-108. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v2n2.p93-108>
- Zakiah, W., Karsidi, R., & Yusuf, M. (2021). The implementation of inclusive educational policies in elementary school. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 54(1), 130-140. <https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v54i1.32210>